

EVALUASI KRITERIA KEMISKINAN MENURUT PROGRAM  
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA  
DAN MASYARAKAT

(Kawasan di Desa Tembilah Buluh dan Desa Muam Tahus Kecamatan Nangka)

TESIS

Oleh :

**YUSMAR**  
**BP. 99202015**



PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2001

MILIK

UPT PERPUSTAKAAN

EPRINTS KEMISKINAN DAN MASYARAKAT

Program Pembangunan Keluarga Sejahtera dan masyarakat  
(Kasus di Desa Teratak Buluh dan Desa Muara Takus Kabupaten Kampar)

Oleh : Yusmar

(Dibawah bimbingan H. Helmi dan H. Effendri)

## RINGKASAN

Banyak sudah penelitian dan pengkajian masalah kemiskinan telah dilakukan, diiringi pula dengan penerapan kebijaksanaan oleh pemerintah dengan berbagai program kemiskinan. Akan tetapi kenyataannya kebijaksanaan yang dapat dipakai pada semua tempat belum ditemui, sehingga hasil yang diperoleh belum memuaskan. Keadaan ini terjadi diduga disebabkan oleh pola kebijaksanaan yang dilaksanakan selama ini selalu bersifat umum dan sentralistik, sehingga kurang memperhatikan aspirasi masyarakat lokal sebagai sasaran program. Menyikapi persoalan ini, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah; maka sudah saatnya pengalaman empiris masyarakat lokal harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada konteks penanggulangan kemiskinan berarti suara orang miskin itu sendiri sebagai sasaran program harus pula diberikan, mengingat sebenarnya mereka sendirilah yang paling mengerti dengan kemiskinan yang mereka alami.

Untuk melihat bagaimana keterlibatan masyarakat miskin pada suatu program kemiskinan, maka penelitian ini mengambil suatu kasus pada dua desa di Kabupaten Kampar, yaitu Desa Teratak Buluh dan Desa Muara Takus, dimana telah dilaksanakan suatu program penanggulangan kemiskinan, yaitu Program Pembangunan Keluarga Sejahtera (Program PKS), namun dalam pelaksanaannya terdapat hasil yang berbeda antara kedua desa tersebut. Berdasarkan ketetapan BKKBN (Program PKS) Desa Teratak Buluh tergolong berhasil dalam melaksanakan program, sementara Desa Muara Takus tergolong belum berhasil. Padahal jika dilihat dari waktu pelaksanaannya, instansi yang membina, bentuk dan besarnya bantuan yang diberikan serta keadaan geografis dari kedua desa tersebut tidak jauh berbeda. Hal ini bisa dikaitkan dengan masalah sasaran program, kenyataan ini memunculkan persoalan, apakah pengertian dan kriteria masyarakat miskin yang ada pada program telah sesuai dengan pengertian dan kriteria miskin yang ada di masyarakat lokal, serta apakah mayoritas jumlah serta prosentase orang miskin menurut masyarakat lokal telah mendapatkan bantuan program PKS tersebut?

## L P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang.

Pembahasan tentang kemiskinan memang sudah sejak lama dan telah banyak mendapatkan perhatian dari para ahli. Berbagai hasil yang diperoleh tentu sangat berguna dalam usaha mengatasi kemiskinan. Seiring dengan itu beberapa kebijaksanaan telah dilaksanakan oleh pemerintah agar kemiskinan dapat ditanggulangi dan dientaskan. Akan tetapi, tanpa bermaksud mengecilkan arti temuan dan hasil yang telah diperoleh, bahwa apa yang telah dicapai selama ini belumlah memuaskan, apalagi suatu kebijaksanaan yang dapat dipakai untuk diterapkan pada semua tempat kelihatannya sulit untuk ditemui. Pernyataan ini cukup beralasan mengingat sampai saat ini tidak jarang terjadi suatu kebijaksanaan yang diterapkan berhasil pada suatu tempat, tetapi kurang berhasil bahkan gagal di tempat lain. Selain itu kemiskinan masih memperlihatkan sosok nyata dalam masyarakat, catatan terakhir memanujukan angka 49,5 juta atau 24,2% (BPS, 1999). Bahkan BKKBN yang menyebut masyarakat miskin dengan istilah *Pra - Sejahtera* mencatat lebih besar lagi, yaitu 105,5 juta atau 51,6% (BKKBN, 2000). Melihat kondisi sebagaimana diatas memberikan indikasi, bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan normal dalam proses pembangunan (penanggulangan kemiskinan), sekaligus memberikan alasan, bahwa masalah kemiskinan tidak dapat di tanggulangi secara umum melainkan harus secara klinis, untuk itu masih diperlukan pengkajian lebih spesifik secara berkelanjutan.

Berbicara masalah sulitnya mengatasi masalah kemiskinan memang diakui oleh para ahli, karena disamping sifatnya yang kompleks dan multi dimensi, berbagai aspek ikut pula berpengaruh didalamnya. Mencermati persoalan tersebut, mengingat kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan pembangunan yang dilaksanakan maka dipandang perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan pada pola kebijaksanaan kemiskinan itu sendiri sesuai dengan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan. Namun perubahan dan

penyempurnaan tersebut tidaklah secara serampangan, melainkan dibutuhkan pemikiran yang mendalam dan identifikasi yang jelas serta penanganan yang tepat. Jika tidak menurut Soemodiningrat, *et al* (2000), kita hanya akan menghadapi kenyataan melakukan therapy yang "*tambal sulam*" saja.

Menyikapi masalah ini, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah dan terjadinya pelaksanaan pembangunan selama ini yang cendrung berkonotasi kurang mempertimbangkan kondisi masyarakat lokal, maka pendapat Muridan (1997) dalam Afkar (1999) untuk melaksanakan pembangunan dengan *mempertimbangkan pengalaman empiris masyarakat lokal*, kiranya perlu dicermati dan dijadikan suatu kajian dalam melihat kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan yang ada dewasa ini. Konsep ini dilaksanakan dengan jalan melaksanakan pembangunan berdasarkan apa yang dimiliki penduduk miskin dipedesaan dan mengembangkan organisasi yang ada pada mereka (Verhagen, 1996). Dalam arti, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam pengambilan kebijaksanaan publik dan memberikan wewenang sesuai dengan porsi mereka (Mustopodidjojo, 1996). Seiring dengan itu Yen (1920) dalam Albintani (1999), mengatakan, bahwa mulailah apa yang diketahui oleh rakyat, dan bangunlah dengan apa yang dimiliki oleh rakyat. Penerapan pelaksanaan sebagaimana tersebut diatas memang terbukti berhasil sebagaimana pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan IDT di daerah Bali dan DI, Yogyakarta (Mubyarto, 2000).

Dewasa ini berbagai program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan telah diterapkan oleh pemerintah dari pelita ke pelita dengan bentuk dan pola yang berbeda. Satu diantaranya adalah *Program Pembangunan Keluarga Sejahtera (Program PKS)*.

Program PKS, merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai kelanjutan dari Program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Jika program IDT ditujukan kepada masyarakat yang ada di *wilayah desa tertinggal*, maka program PKS justru ditujukan kepada masyarakat *diluar wilayah desa tertinggal*. Program ini berdasarkan pada Inpres No 3 tahun

## IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

### 5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa ada perbedaan pengertian dan kriteria kemiskinan antara program PKS dengan masyarakat lokal. Pengertian dan kriteria program PKS terlalu umum dan luas, sementara pengertian dan kriteria masyarakat lokal lebih sederhana dan spesifik.
2. Bahwa keluarga miskin mempunyai masyarakat lokal yang mendapatkan bantuan program masih relatif kecil. Terbukti dari 75% masyarakat miskin yang ditetapkan program mendapatkan bantuan, ternyata dari 63 keluarga yang diteliti, hanya 35 keluarga (55,56%) yang mendapatkan bantuan. Dengan demikian program PKS dapat dikatakan belum tepat sasaran.
3. Bahwa program dikucurkan bukan berdasarkan permintaan masyarakat, melainkan atas penawaran dari pemerintah, sehingga aspirasi dan lembaga masyarakat lokal (LML) menjadi terabaikan.

### 5.2. Implikasi.

#### 5.2.1. Implikasi Teoritis

1. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka penentuan keluarga miskin seharusnya ditentukan oleh masyarakat dengan kriteria yang ada pada masyarakat itu sendiri,
2. Guna penetapan kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan kedepan seharusnya melibatkan masyarakat miskin di tingkat ayam program yang dilaksanakan dapat tepat pada sasarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, Irna dan C.T. Morris. 1973. Economic Growth and Social Equity in Developing Countries. California. Standford University Pres.
- Albintani, 1999. Riau menatap masa depan. Rian Press. Pekanbaru.
- Alfian, M.G.Tan, dan Selosumarjan. 1980. Kemiskinan Struktural suatu Bunga Rampai. Yayasan Ilmu Sosial. Jakarta.
- Afkar, 1999. Analisis manfaat sosial ekonomi Program Pembinaan masyarakat Desa Hutan bagi Masyarakat Desa sekitar hutan, kausu di Mentawai. PPS. Unand Padang.
- Arief, S dan Sasono. 1981. Indonesia Pertumbuhan ekonomi, Disparitas Pendapatan dan kemiskinan Massal. I.S.P. Jakarta.
- Asnawi, S. 1993. Aspek sosial ekonomi dalam pelaksanaan IDT di Sumatera barat. makalah seminar dan kongres Ikatan keluarga Alumni UNAND. Padang.
- , 1994. Peranan Pendidikan dalam meningkatkan mutu SDM untuk pengentasan kemiskinan di Sumbar. Makalah/seminar Dies Natalis ke 13 Universitas Bung Hatta. Padang.
- Badan Pusat Statistik. 1996. Indikator Kesejahteraan Rakyat. BPS, Jakarta.
- , 1992. Perhitungan jumlah pemluuk miskin dan distribusi pendapatan. BPS, Jakarta.
- , 1999. Indeks Kesejahteraan Masyarakat. BPS, Jakarta.
- Bappenas dan Depdagri. 1993. Panduan Penyelenggaraan Program IDT. Jakarta.
- Berger,P.L., and Neuhaus. 1977. To Empower People or Mediating structures in Public Policy. American Institute for Public Policy Research pp.1-7. Washington.
- BKKBN Jakarta. 1996. Panduan Pembangunan Keluarga sejahtera dalam peningkatan penannggulangan kemiskinan. BKKBN. Jakarta.
- , 1997. Pokok-pokok pikiran Program terpadu Prokesra untuk memenatapkan Program menghapus kemiskinan. BKKBN, Jakarta.
- , 1998. Petunjuk pelaksanaan pengembangan Kemitraan Usaha Prokesra. BKKBN. Jakarta.
- BKKBN Kampar. 2000. Laporan bulanan Desember. Bangkinang.